

Perilaku Politik Elite Muhammadiyah Pada PILKADA: Studi Kasus di Wilayah Kauman Temanggung Jawa Tengah

Andy Dermawan,* Tulus Warsito dan Mahli Zainuddin**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: andy.dermawan@uin-suka.ac.id

Abstract: This article seeks to explore the influential factors behind the high number of votes for the regent candidate promoted by Muhammadiyah Religious Organization through the National Mandate Party (PAN) in the Kauman Region of Temanggung Regency. Based on the theory of rational choice, this study reveals that the the Muhammadiyah elites in Temanggung in the 2013 Regional Election tended to apply moderate-accommodative political behavior. Muhammadiyah elites were inclined to take the middle path and took adaptive measurements to respond the emerging dynamics in the political realms of the regions. The community (respondents) opted to vote for Anif Punto as the regent candidate based on rational factors considering various indicators, such as the promises of the candidates and parties, the candidates' capabilities, the candidate's self-confidence in his performance, and the candidate's and the party's vision, mission and programs. Meanwhile, as seen from the perspective of *maqasid asy-syari'ah* theory, the elites and the Muhammadiyah citizens at large tended to apply freedom of choice in their political behavior and political awareness without restricted by ideological barriers, parties or community organizations they are engaged in. They opted to vote for candidates who, in their opinion, could provide them with better future assurance and at the same time provide greater benefit to the community.

Keywords: Temanggung Regional Election; Muhammadiyah elites; Islamic politics; political behavior

Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya perolehan suara calon bupati yang diusung oleh Muhammadiyah melalui Partai Amanat Nasional (PAN) di wilayah Kauman Temanggung. Berdasar teori pilihan rasional, kajian ini menemukan fakta bahwa perilaku politik elite Muhammadiyah di Temanggung pada Pilkada 2013 adalah moderat-akomodatif. Elite Muhammadiyah memiliki kecenderungan mengambil jalan tengah dan beradaptasi dengan dinamika yang terjadi dalam realitas perpolitikan di daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat (responden) memilih Anif Punto sebagai calon bupati adalah faktor rasional, yaitu mempertimbangkan berbagai indikator, seperti janji-janji calon dan partai, kemampuan calon, keyakinan terhadap kinerja

calon, visi, misi, dan program calon dan partai. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif *maqashid asy-syari'ah*, perilaku politik elite dan kesadaran warga Muhammadiyah dalam menentukan pilihannya tidak terbelenggu oleh sekat ideologi, partai atau organisasi masyarakat yang dinaungi. Pilihan ditujukan kepada calon yang menurut mereka bisa memberikan perlindungan yang lebih baik dan sekaligus memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat.

Kata kunci: Pilkada Temanggung; elite Muhammadiyah; politik Islam; perilaku politik

Pendahuluan

Muhammadiyah dan politik merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Dalam proses kelahirannya, Muhammadiyah bersinggungan dengan dinamika politik saat itu, dan dakwah sebagai corongnya, senantiasa bersentuhan dengan realitas politik dalam syiar nilai-nilai Islam yang disampaikan dan diperjuangkannya. Sebagai organisasi sosial keagamaan, kontribusi Muhammadiyah dalam perpolitikan di Indonesia tidak terlepas dari perilaku politik elitenya dalam ikut serta membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkemajuan. Para elite politik adalah “pemilik” status sosial yang memiliki modal sosial tinggi yang mampu membangun pengaruh di masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama.¹

Perilaku politik memiliki keterkaitan dengan kesadaran dan tujuan politik dari elite politik sebagai aktor yang memainkan peran politik. Selain itu, ia juga merupakan hasil dari pertemuan faktor-faktor struktur-struktur kepribadian, keyakinan politik, tindakan politik individu dan struktur serta proses politik yang menyeluruh. Beberapa variabel yang mendukung perilaku politik meliputi variabel personal dan situasional. Variabel personal meliputi pengalaman-pengalaman individual, warisan genetik, persepsi, motivasi, tujuan, sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Sementara variabel situasional terdiri atas keyakinan-keyakinan budaya, termasuk nilai dan norma, struktur sosial, faktor-faktor geografis dan

¹ Andy Dermawan, “Dialektika Muhammadiyah dan Politik: Suatu Ikhtiar Memahami Pasang Surut dan Dinamika” (Diskusi Bulanan Institut Riset Sosial dan Humaniora, Yogyakarta, 8 September 2015), hlm. 1.

kemampuan teknologi.²

Perilaku politik dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, kelas sosial, agama dan ideologi. Selain itu, ia juga dipengaruhi oleh (1) kekuasaan, sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, (2) kepentingan, yakni tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik, (3) kebijaksanaan, yang merupakan hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan, dan (4) budaya politik-orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik.³

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa wilayah di Indonesia, Kauman merupakan wilayah yang dihuni oleh mayoritas warga Muhammadiyah atau biasa disebut “kampung Muhammadiyah”, sehingga bisa pula diklaim bahwa asal ada Kauman, maka sudah “pasti” mayoritas warganya adalah Muhammadiyah. Namun tidak demikian halnya dengan Kauman Temanggung yang ternyata jumlah warga Muhammadiyah masih di bawah jumlah mayoritas, meskipun tidak begitu signifikan.

Kauman Temanggung dibagi menjadi dua wilayah, yakni Kauman Selatan dan Kauman Utara. Kauman Selatan adalah wilayah di sekitar masjid Agung Temanggung sementara Kauman Utara yakni wilayah seberang jalan utara masjid, Suronatan. Pada Pilkada Temanggung tahun 2013, hasil observasi menunjukkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Kauman Selatan (TPS 4) calon Bupati dari Muhammadiyah memperoleh 38,7 % suara, dan Kauman Utara (TPS 6) memperoleh 81,3 % suara.⁴ Hal ini

² Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Luqman Hakim (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 54.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, XI (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 49.

⁴ Data KPU Kabupaten Temanggung penting diketahui, bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Temanggung yang melaksanakan Pilkada pada 26 Mei 2013 untuk masa pemerintahan 2013-2018 sangat tinggi, yakni 82,89% lebih tinggi dari tahun sebelumnya 80,18%, bahkan juga partisipasi ini diklaim tertinggi di pulau Jawa. Lihat Data Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2013 di tingkat Kabupaten. Lihat juga “Bambang Irawan Menang Pilkada

menimbulkan pertanyaan menyangkut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menjadikan calon bupati yang diusung Muhammadiyah melalui Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh suara tertinggi di wilayah Kauman.

Kajian mengenai perilaku politik Muhammadiyah menarik banyak minat. Syarifuddin Jurd़i misalnya menelaah hal tersebut dalam karya disertasinya yang berjudul *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia (1966-2006)*. Dia menemukan bahwa sikap netral Muhammadiyah terhadap politik diterapkan untuk menjaga independensi gerakan serta menghilangkan kesan telah terkooptasi oleh partai politik.⁵ Sementara Alfian dalam penelitiannya yang berjudul *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, menjelaskan bahwa Muhammadiyah melalui pembaruannya telah memberikan kontribusi besar bagi perilaku politik Islam di Indonesia.⁶ Penelitian David Efendi yang berjudul *Politik Elite Muhammadiyah: Studi tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah*, menemukan adanya dinamika dalam perilaku Muhammadiyah setelah kegagalan politik tahun 2004 yang memunculkan kubu anti politik praktis yang menguat pascakekalahan Muhammad Amien Rais.⁷

Temanggung,” diakses tanggal 4 Maret 2014, <http://krjogja.com/read/174911/bambang-irawan-menang-pilkada-temanggung.kr>.

⁵ Syarifuddin Jurd़i, “Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia: Tahun 1966-2006” (Disertasi, Yogyakarta, Program Studi Politik Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana UGM, 2008). Lihat juga tulisan Achmad Nurmandi, yang menyatakan bahwa, “ideologi politik sangat mempengaruhi sikap dan perilaku birokrat”. Konteksnya dengan penelitian ini dan pendapat Syarifuddin Jurd़i adalah, bahwa warga Muhammadiyah sebagiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dalam pemerintahan sehingga cukup sulit menentukan sikap dan pilihan politik ketika dihadapkan pada perubahan politik. Lihat Ahmad Nurmandi, “Perilaku Birokrasi Publik di Indonesia: Sebuah Kajian Teoritis,” *Jurnal Sosiohumaniora* 7, no. 1 (Juli 2005), hlm. 150–52.

⁶ Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), hlm. 341–46.

⁷ David Efendi, *Politik Elite Muhammadiyah: Studi tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah* (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2014), hlm. 1–3.

Sementara itu, Suwarno melalui tulisannya yang berjudul “Muhammadiyah, Islam dan Runtuhnya Orde Baru: Studi tentang Perubahan Perilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998,”⁸ menjelaskan pengaruh perilaku politik praktis Amien Rais terhadap internal persyarikatan Muhammadiyah, yang berakibat munculnya faksi-faksi di dalam tubuh Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah puritan dan Muhammadiyah berpolitik praktis. Ridho al-Hamdi dalam penelitiannya yang berjudul *Dinamika Islam dan Politik Elite-elite Muhammadiyah Periode 1998-2010*, menyimpulkan bahwa politik elite Muhammadiyah merupakan representasi kaum modernis dalam merespons dinamika Islam dan politik pasca Orde Baru. Penelitian menghasilkan empat varian perilaku kaum modernis, yakni (1) sikap transformatif-idealistik, (2) sikap moderat-idealistik, (3) sikap realistik-kritis, dan (4) sikap akomodatif-pragmatis.⁹

Dalam wilayah lokal, kajian Mukhlis yang berjudul *Perilaku Elite Politik Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi*, mengeksplorasi keragaman sikap politik elite Muhammadiyah yaitu: aktif, pasif, dan kreatif, yang bertujuan membangun strategi, mengatur distribusi, dan menciptakan *bargaining* yang merupakan manuver politik elite.¹⁰ Haedar Nashir juga menyoroti tentang perilaku politik Muhammadiyah di wilayah Pekalongan Jawa Tengah melalui karyanya yang berjudul *Perilaku Politik Elite Muhammadiyah di Pekajangan*.¹¹ Nashir menyimpulkan bahwa pada wilayah lokal, perilaku politik elite Muhammadiyah merupakan manifestasi tindakan individu yang terakumulasi dalam kelompok.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013 memberikan proses pembelajaran politik yang berharga bagi

⁸ Suwarno, *Muhammadiyah sebagai Oposisi* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

⁹ Ridho al-Hamdi, “Dinamika Islam dan Politik Elite Muhammadiyah Tahun 1998-2010,” *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 1 (Februari 2012).

¹⁰ “Disertasi Teliti Perilaku Politik Elite Muhammadiyah,” diakses tanggal 5 September 2016, <http://www.malang-post.com/pendidikan/73247-disertasi-teliti-perilaku-politik-elite-muhammadiyah>. Lihat juga Mukhlis, “Perilaku Politik Elite Keagamaan dalam Politik Lokal,” *Jurnal Salam* 18, no. 1 (Juni 2015), hlm. 1-183.

¹¹ Haedar Nashir, *Perilaku Elite Politik Muhammadiyah di Pekajangan* (Yogyakarta: Tarawang, 2000).

masyarakat Temanggung dan Indonesia pada umumnya. Tingginya partisipasi masyarakat (yang mencapai 82,89%)¹² menunjukkan bahwa kesadaran politik yang ditumbuhkan oleh para elite politik dan partai politiknya berhasil dilakukan.¹³ Dipilihnya Kauman Temanggung sebagai objek penelitian memiliki beberapa alasan. *Pertama*, pemilihan kepala daerah di wilayah ini diikuti oleh lima kontestan calon pemimpin daerah. *Kedua*, di wilayah Kauman Temanggung yakni Kauman Selatan sekitar masjid dan Kauman Utara di wilayah Suronatan, khususnya di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS 4 dan TPS 6), memperoleh suara tertinggi, padahal warga Muhammadiyah bukanlah mayoritas. *Ketiga*, Kabupaten Temanggung memiliki kekayaan pertanian, seperti hasil bumi tembakau, dan lain sebagainya.

Kajian ini menggunakan teori pilihan rasional, yang menurut James S. Coleman, sebagaimana dikutip oleh Tulus Warsito, adalah tindakan perseorangan yang mengarah pada sesuatu tujuan yang ditentukan oleh nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor di mana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud dalam arti bahwa aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan. Selain itu, aktor juga dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tindakan pilihan aktor.¹⁴

Analisis Tulus Warsito menunjukkan bahwa ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Tindakan rasional individu biasanya mengarah pada masalah hubungan makro-mikro atau bagaimana cara gabungan tindakan individu menimbulkan perilaku sistem sosial. Inti dari teori

¹² Data Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten. Lihat juga “Bambang Irawan Menang Pilkada Temanggung.”

¹³ “Data KPUD Kabupaten Temanggung Tahun 2013”.

¹⁴ Tulus Warsito, *Rasionalitas Politik* (Yogyakarta: Program Doktor S3 Politik Islam UMY bekerja sama dengan Komojoyo Press, 2017), hlm. 87.

pilihan rasional adalah bahwa pilihan, keyakinan, dan tindakan memiliki hubungan satu sama lain. Sebuah tindakan akan dikatakan rasional bila tindakan tersebut memiliki hubungan dengan pilihan, keyakinan, yaitu dalam arti bahwa tindakan tersebut dapat dibuktikan sebagai tindakan yang paling dapat memuaskan pilihan si pelaku sesuai dengan keyakinan yang ia miliki dan dibuktikan secara *ex ante* dan bukan secara *ex post*, karena pengetahuan manusia tidak ada yang sempurna sehingga orang rasional tetap bisa melakukan kesalahan secara *ex post*.¹⁵

Selain menggunakan teori pilihan rasional, kajian ini juga menggunakan teori *maqashid asy-syari`ah*. Pilihan rasional yang dilakukan oleh warga Temanggung dalam partisipasi politiknya, merupakan pilihan dengan tujuan agar kehidupan ke depan lebih baik lagi. Hal ini senada dengan makna *maqashid asy-syariah* yang bertujuan mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan yang dimaksud diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap enam hal, yaitu menjaga keyakinan (*preserving of faith*), menjaga jiwa (*soul*), menjaga akal (*mind*), menjaga keturunan (*offspring*), menjaga kehormatan (*honor*), dan menjaga harta (*wealth*).¹⁶ Dalam konsep *maqashid asy-syariah* Jaser Auda upaya untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia ditempuh dengan menggunakan teori sistem yang dipadukan dengan pendekatan yang bersifat multidimensional (*Multi-dimensional approach*) dan sekaligus pendekatan yang utuh-menyeluruh (*Holistic approach*).¹⁷

Hak politik yang tersampaikan dalam pemilihan suara mewakili salah satu atau beberapa aspek *preserving* dalam konsep *maqashid asy-syariah*. Penerapan *maqashid asy-syariah* sebagai sebuah metode tidak lepas dari keterkaitannya dengan pendekatan inter dan multidisipliner. Pendekatan ini tidak hanya berhubungan dengan ilmu politik Islam, tetapi juga pengetahuan lain yang berhubungan dengan latar belakang

¹⁵ Warsito, hlm. 87.

¹⁶ Jaser Auda, *Maqasid al-Sharia as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London–Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 191. Lihat juga M. Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi”, *Ayy-Syir`ah: Jurnal Ilmu Syari`ah dan Hukum* 46, no. 2, (Desember 2012), hlm. 315–368.

sosial budaya serta latar belakang pendidikan masyarakat setempat. Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai poin penting dalam pengembangan konsep *maqashid asy-syariah* untuk mewujudkan tercapainya nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan secara universal.

Perilaku Elite Politik dan Pilihan Rasional

Diskursus tentang elite politik, sering kali dikaitkan dengan perilaku politik aktor dalam masyarakat politik. Teori elite dibangun di atas pandangan bahwa keberadaan elite, lebih-lebih elite politik, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern yang kompleks.¹⁸ Struktur perilaku sosial atau tindakan sosial yang dikaji sosiologi dalam hubungannya dengan studi tentang elite terkait dengan struktur kepribadian, struktur sosial, dan struktur kebudayaan yang melingkupi kehidupan para elite tersebut.

Para ilmuwan yang mengkaji dan menterorisasikan konsep elite seperti Pareto, Mosca, Michels, dan Darso, mengatakan bahwa di mana dan kapan saja, masyarakat selalu dipimpin oleh sekelompok individu kecil yang berkuasa. Pareto memahami elite lebih pada kekuasaan politik atau kelompok yang memerintah dan elite yang tidak memerintah dengan kedudukan atau jabatan puncak dalam masyarakat. Di sisi lain Suzanna Keller lebih melihat tingkat pengaruh dan dampak yang diakibatkan oleh elite sehingga mereka bisa bertahan.¹⁹

Soerjono Soekanto membatasi pengertian elite sebagai kelompok orang-orang yang dalam situasi sosial tertentu menduduki posisi tertinggi, dianggap mempunyai kekuasaan besar dan hak istimewa. Mereka terkadang diartikan sebagai golongan aristokrat yang berkuasa, termasuk karena faktor keturunan. Elite digambarkan sebagai kelompok yang terbatas dan memiliki peran di level atas dalam suatu organisasi tertentu. Menurut Haryanto, elite itu senantiasa merujuk pada seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan tertentu di mana dengan keunggulan tersebut yang bersangkutan

¹⁸ Julia Jary dan David Jary, *Collins Dictionary of Sociology* (Glasgow: Harper Collin Publisher, 1991), hlm. 188–89.

¹⁹ Efendi, *Politik Elite Muhammadiyah: Studi tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah*, hlm. 12.

dapat menjalankan peran yang berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu.²⁰ Dengan demikian yang dimaksudkan dengan elite ialah posisi pada puncak struktur sosial di masyarakat.

Memilih adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktivitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung.²¹ Pada dasarnya, terdapat beberapa faktor yang dapat dianggap mempengaruhi perilaku pemilih, seperti isu-isu politik, regulasi atau kebijakan politik, pengaruh elite, identifikasi kepartaian atau aliran politik, representasi keyakinan atau kesamaan ideologi agama,²² kelas sosial, ketokohan, termasuk juga loyalitas pada simbol dan figur-figur tertentu.

Keyakinan dapat dikatakan benar bila sesuai dengan bukti-bukti yang ada, dan untuk membuktikan bahwa sebuah tindakan adalah rasional harus menunjukkan sebuah deretan di mana tindakan tersebut dipandang sebagai terberi (*given*).²³ Bagi Dan Nimmo, pemberi suara yang rasional pada hakikatnya aksional diri, yaitu sifat yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut

²⁰ Haryanto, *Elite, Massa dan Konflik* (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, 1990), hlm. 6–7.

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 15–16.

²² Diskursus tentang *religious commitment* adalah kajian tentang hubungan agama dan politik. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa di negara-negara maju seperti di Eropa Barat, agama dianggap hal yang tidak begitu penting di dunia modern. Agama adalah hal privasi pemeluk, sehingga hanya Tuhan dan dirinya yang tahu. Beberapa kajian di Barat, khususnya di Amerika, tentang agama ternyata berkontribusi signifikan dalam politik di dunia modern. Khusus pada persoalan komitmen keagamaan, lihat David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, *Agama dalam Politik Amerika*, alih bahasa oleh Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hlm. 4–11; Lihat juga Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Sekularisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 15–16.

²³ Warsito, *Rasionalitas Politik*, hlm. 88; Lihat juga James S. Coleman and Thomas J. Fararo, *Rational Choice Theory: Advocacy and Critique* (Newbury Park, Calif: SAGE Publications, 1992).

memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warga negara.²⁴

Menurut Dennis Kavanaagh, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Surbakti, pilihan rasional melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada. Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan rugi untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada pada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan, baik untuk kepentingan sendiri (*self interest*) maupun untuk kepentingan umum.²⁵ Dalam konteks ini, pemilih tidak pasif, artinya mereka tidak terbelenggu oleh ideologi-ideologi, simbol-simbol, faktor psikologis, tetapi bersifat aktif dan memiliki tindakan bebas memilih dan menentukan pilihannya.

Muhammadiyah, Dakwah dan Politik

Secara faktual, ikhtiar mewujudkan pemerintahan yang baik agar tercipta masyarakat yang berkemajuan dan bermartabat, bukanlah persoalan mudah. Sejak zaman penjajahan hingga menjelang kemerdekaan sering kali Muhammadiyah cukup kesulitan “mengambil sikap” ketika harus berhadapan dengan pemerintah sebagai penguasa. Meski dianggap hanya organisasi yang bergerak di arena sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah kadang kala *ngeli* dalam situasi politik oleh karena terbatasnya akses dan gerak politik yang dilakukan. Hal inilah yang melatar argumen bahwa peran maupun respons Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia lebih ditentukan oleh watak rezim yang berkuasa.²⁶ Sehubungan dengan posisi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bergerak pada wilayah

²⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* (Bandung: CV. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 148.

²⁵ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 146–47.

²⁶ Jurdji, “Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia: Tahun 1966–2006,” hlm. 1.

sosio-kultural, perannya pada wilayah politik sangat terbatas.²⁷ Seiring kedewasaan Muhammadiyah di dalam menjalani rentang dan waktu serta persinggungannya dengan ranah politik, pada masa Orde Baru Muhammadiyah mampu bersikap secara elegan. Meski realitasnya Muhammadiyah menjaga jarak dengan pemerintah, namun hubungan komunikasi sosial, budaya, ekonomi dan politik berjalan dinamis.

Dalam konteks politik di Indonesia, Muhammadiyah tidak pernah menyatakan diri sebagai partai politik. Sesuai dengan penegasan yang dikandung dalam *matan* kepribadiannya, dimensi politik Muhammadiyah muncul dalam rangka dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.²⁸ Dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dilakukan Muhammadiyah dalam rangka mencari ridla Allah. Tidak sekadar berceramah, melainkan lebih dari itu, disiapkan semua sarana dan prasarana di dalam mengawal dakwahnya. Wajar, jika pada akhirnya Muhammadiyah mampu masuk ke dalam lini masyarakat, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Temanggung dan Pemilihan Kepala Daerah

Potret masyarakat Temanggung secara sosio-struktural adalah masyarakat nasionalis-religius. Karakter nasionalis ditandai dengan heterogenitas masyarakat yang hidup berdampingan secara turun-temurun meski terdapat perbedaan, namun persatuan dan kesatuan menjadi alasan utama mengapa mereka meski berdamai dengan perbedaan. Sementara karakter religius ditandai dengan gemuruh keagamaan yang mewarnai masyarakat Temanggung. Keadaan itu didukung oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majlis Tafsir Al-Quran (MTA), Salafi dan beberapa organisasi keagamaan lainnya. Tentu saja, hal ini cukup mewarnai

²⁷ Jurdji, hlm. 1.

²⁸ Syamsul Hidayat, "Pemikiran Muhammadiyah tentang Pluralitas Budaya" (Disertasi, Yogyakarta, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 76. Syamsul Hidayat menjelaskan penelitian Ahmad Jainuri (Disertasi aslinya berjudul "*The Formation of The Muhammadiyah's Ideology 1912-1942*") dalam Disertasinya, bahwa salah satu cara melihat itu inklusif atau terbuka gerakan tajidinya, dari perilaku KH. Ahmad Dahlan dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni aktif berdialog terbuka dengan tokoh-tokoh gereja, bahkan aktif mengajar di beberapa sekolah Belanda saat itu.

perilaku masyarakatnya. Tipologi masyarakat yang sedemikian memiliki solidaritas sosial, nilai-nilai sosial yang terbentuk, dan gotong royong warga. Hubungan sosial dan struktur masyarakat yang telah terbentuk itu mampu mengeliminir sikap-sikap kontra produktif sehingga perbedaan dan ketegangan dalam perhelatan politik tidak membuat keregangan sosial di antara mereka berkelanjutan.

Dinamika masyarakat Temanggung di wilayah Kauman tidak jauh berbeda dengan keadaan seperti digambarkan di atas. Andaipun ada perbedaan, tentu hal itu berkaitan dengan rasionalitasnya, karena masyarakat perkotaan relatif lebih rasional dalam beberapa hal. Secara umum, afiliasi organisasi keagamaan masyarakat Kauman cenderung ke Nahdlatul Ulama, khususnya masyarakat di bagian selatan masjid, masyarakat bagian tengah cenderung tak berafiliasi karena sebagian juga pendatang, dan masyarakat di utara masjid sebagian warga berafiliasi ke Muhammadiyah. Potret ini memperlihatkan bahwa masyarakat Kauman heterogen.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013 diikuti oleh lima pasangan calon, yakni (1) Budiarto dan Dedi Haryadi yang diusung oleh PPP, PKNU, Demokrat, Golkar, dan Hanura; (2) Fuad Hidayat dan Andoyo yang diusung oleh PKB dan Gerinra; (3) Bambang Sukarno dan Irawan Prasetyadi yang diusung oleh PDI-P, (4) Hadi Kuswanto dan Tri Murdoko yang merupakan calon perseorangan (independen), dan (5) Anif Punto Utomo dan Budidoyo. Berikut daftar pasangan calon, partai pengusung dan visimisinya dalam pencalonan.²⁹

Tabel 1: Pasangan dan Visi Pasangan Calon

| No | Nama Paslon | Asal Partai/ Koalisi | Visi Pasangan Calon |
|----|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Budiarto dan Dedi Haryadi | PPP, PKNU, Demokrat, Golkar, Hanura | Visi: Bersatu Menuju Masyarakat Temanggung yang Lebih Sejahtera. |

²⁹ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, “Visi, Misi, dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013” (KPU Kabupaten Temanggung, 2013).

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | Motto: Kerja Keras, Cerdas, Jujur, Ikhlas dan Anti Korupsi. |
| 2 | Fuad Hidayat dan Andoyo | PKB, Gerindra | Maju Lebih Cepat Sejahtera Bersama, Menuju Kabupaten Temanggung Berprestasi di Tingkat Nasional |
| 3 | Bambang Sukarno dan Irawan Prasetyadi | PDI-P | Temanggung kota agraris yang berwawasan lingkungan, desa dan kota sebagai tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan agamis diwujudkan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. |
| 4 | Hadi Kuswanto dan Tri Murdoko | Perseorangan, Independen | Mewujudkan Temanggung sebagai daerah pertanian, perdagangan, dan pariwisata yang religius dan gemah ripah loh jinawi. |
| 5 | Anif Punto Utomo dan Budidoyo | PAN | Temanggung MANTAB (Mandiri, Aman, Nyaman, Tertib, Adil dan Bermartabat). |

Perolehan suara tertinggi di wilayah Kauman, khususnya di TPS 4 dan TPS 6 dari jumlah keseluruhan yakni 11 TPS di Wilayah Kauman atau Kelurahan Temanggung Kecamatan Temanggung Jawa Tengah.³⁰

³⁰ Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Kecamatan Temanggung. Adapun jumlah keseluruhan TPS se-Kabupaten Temanggung berjumlah 1717 TPS, sedangkan yang diteliti di wilayah Kauman Temanggung terdiri dari 11 TPS yang ada.

Di data KPU Temanggung, 11 TPS di wilayah Kauman tidak disebutkan letak keberadaannya, hanya menyebut TPS 1 sampai dengan TPS 11. Adapun di laporan KPU Temanggung yang disebutkan adalah data per kecamatan atau nama kecamatannya. Di pilihnya TPS 4 dan TPS 6 karena di kedua TPS tersebut warga Muhammadiyah bukanlah mayoritas, meski jumlahnya tidak begitu signifikan. Selain itu, perilaku politik elite dan warga Muhammadiyah di TPS 4 dan TPS 6 lebih tampak menguat di dalam setiap perhelatan-perhelatan politik, di samping masyarakatnya memiliki kemandirian berpolitik di dalam menentukan pilihan politiknya. Kemandirian berpolitik itu sesungguhnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, wawasan dan pandangan dunia, yang mengubah cara pandang terhadap pilihan politik.

Berikut rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Temanggung.

Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Wilayah Kauman Temanggung

| A | NO | Nomor dan Nama Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung | TPS4 | TPS6 |
|----|----|--|-----------|----------|
| | 1. | Budiarto, MT. dan Dedi Haryadi | (20,1 %) | (1,59 %) |
| | 2. | Fuad Hidayat dan Andoyo | (12,56 %) | (3,97 %) |
| | 3. | Drs. H. M. Bambang Sukarno dan Irawan Prasetyadi, S.Si. | (20,6 %) | (9,5 %) |
| | 4. | Muhamad Hadi Kuswanto dan Tri Murdoko S. S.IP. | (2,01 %) | (0,8 %) |
| | 5 | Anif Punto Utomo dan Budiyono | (38,7 %) | (81,3 %) |
| B. | | Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon | 187 | 245 |
| C | | Jumlah Suara Tidak Sah | 12 | 7 |
| D | | Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah | 199 | 252 |

Sumber: Data diolah dari data KPU Temanggung.

Data tersebut menunjukkan bahwa pasangan Anif Punto dan Budiyono memiliki jumlah prosentase yang cukup tinggi dibanding pasang calon bupati dan wakil bupati yang lain.

Perilaku Politik Elite Muhammadiyah

Memasuki awal tahun politik 2013, warga Muhammadiyah Temanggung, berkoordinasi untuk menentukan sikap Muhammadiyah dalam menghadapi Pilkada. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh BM dan A:

“Mendekati tahun Pilkada Temanggung, kami di pimpinan tampak biasa saja, namun ada hal menarik di sini, justru ada suara dari bawah seperti Ranting dan Cabang, menanyakan dan mengajak pertemuan dengan PDM mengenai siapa kandidat dari Muhammadiyah (PAN), mereka kooordinasi dan konsolidasi secara *bottom up*, bukan *top down*. Katanya, ‘gimana kami harus bersikap tentang persoalan Pilkada ini?’, Ditanya begitu masak kami (PDM) diam, lantas mulai ada pertemuan... Jadi bukan *sami’na wa atho’na*, karena mereka kritis soal ini... Bahkan kriteria calon bakal diusung, mereka ikut menentukan, jadi di bawah koordinasi Ranting, Cabang dan PDM secara *equal...*”³¹

Berdasarkan wawancara tersebut, tampak bahwa ada perilaku partisipasi kolegial yang digerakkan warga Muhammadiyah dari kalangan bawah. Dorongan politik itu dalam rangka motivasi diri untuk ikut serta berpartisipasi membangun daerahnya. Perilaku politik partisipatif inilah yang muncul di kalangan warga Muhammadiyah, sementara elite Muhammadiyah menindaklanjutinya secara koordinatif. Langkah manajerial dilakukan dalam rangka mewadahi aspirasi dan mendapatkan umpan-balik dari hasil respons yang dilakukan.

Rancangan pertemuan demi pertemuan dikoordinasi oleh elite Muhammadiyah Temanggung guna menjaring aspirasi lebih lanjut berkaitan dengan Pilkada Temanggung. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa elite Muhammadiyah tidak bertanggung jawab dan tidak responsif atas perkembangan politik daerah. Sebab, sejak dahulu

³¹ A, 2 Desember 2017.

memang gaya penyampaian aspirasi warga Muhammadiyah Temanggung sudah terlatih dengan baik. Demikian juga sebagian besar masyarakat Temanggung memiliki partisipasi politik yang tinggi, sehingga pada Pilkada 2013, partisipasi politik masyarakat Temanggung mencapai angka 82,89%, dan merupakan partisipasi tertinggi dalam Pilkada di Jawa Tengah. Realitas ini menunjukkan bahwa perilaku politik partisipatif ditunjukkan oleh segenap anggota biasa Muhammadiyah, bukan oleh elitenya. Aksi politik partisipatif ini ditujukan guna mempengaruhi keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan umum, kelompok maupun individu. Keputusan itu bisa berupa usulan, tindakan atau pendapat yang disampaikan kepada elite guna kepentingan politik tertentu.

Penetapan Anif Punto Utomo yang berasal dari Kauman Utara tepatnya di wilayah Suronatan, sebagai calon bupati disampaikan oleh A dan BM yang diperkuat oleh AI. Menurut mereka:

“Garis keturunan Anif Punto itu ayah dan kakeknya seorang perintis dan kader Muhammadiyah Temanggung. Mbah KH. Ahmad Qodhi itu tokoh Muhammadiyah Temanggung, dan anaknya KH. Anwar Qodhi itu Muhammadiyah tapi politisi PPP. Anif Punto itu modal sosialnya seorang wartawan senior Republika. Janji-janji politik yang dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat dan itu membuat masyarakat memilihnya, oleh karena meyakini apa yang diucapkan ...”.³²

Pandangan di atas cukup rasional, calon bupati Anif Punto selain putra daerah, janji politik yang diucapkannya memberi pengaruh pada konstituennya sehingga ia dipilih oleh masyarakat khususnya di Kauman Temanggung. Masyarakat Kauman tergolong kelompok masyarakat rasional, yang dalam konteks tertentu memiliki pilihan-pilihan politik yang rasional meski kadang pragmatis. Pilihan rasional itu ditunjukkan pada pilihan politik mereka yang tidak memikirkan basis sosial keagamaannya. Hal itu sesungguhnya dilatari oleh faktor pendidikan, wawasan, pandangan dunia, dan hubungan serta ketersinggungannya dengan masyarakat urban-kota yang memiliki pilihan politik praktis. Hal ini berbeda dengan tipologi masyarakat yang memiliki “ketergantungan” pada ketokohan atau

³² A, 2 Desember 2017; BM, 2 Desember 2017; AI, 2 Desember 2017.

garis keturunan seseorang yang pernah memberikan imbalan jasa baik itu berupa uang, keamanan, bimbingan sosial, garis primordial keagamaan atau kepartaian politik sehingga berpotensi menempatkan diri sebagai patron-klien.³³

Masyarakat Kauman berbeda secara demografis politik. Mereka memiliki alasan-alasan mendasar dalam mengambil sikap politik, seperti kemandirian di dalam menentukan pilihan politiknya. Hal itu dilatari oleh pendidikan, wawasan, pandangan dunia, dan hasil hubungan timbal balik dengan kaum urban-kota sehingga menjadikan memiliki cara pandang yang terbuka terhadap pilihan politik, termasuk pilihan pada calon bupati yang notabene berada di lingkungan mereka. Terdapat “solidaritas sosial” atau “keterwakilan diri” jika ada warga mereka yang menjadi bupati Temanggung. Menurut AI:

“...mas Anif Punto itu memiliki wawasan akademik yang baik, karena Beliau wartawan senior Republika. Juga pandangan politik yang mumpuni. Makanya kita memilih dia karena selain faktor keilmuannya juga dari warga kita di Kauman. Beberapa warga Kauman menentukan pilihan ke dia tidak berpikiran apakah berlatar belakang organisasi keagamaan tertentu, atau partai politik tertentu, tetapi dari sisi visi dan keyakinan kita pada dia bahwa dia insya Allah bisa memimpin Temanggung lebih baik lagi...”³⁴

Hubungan yang rasional cenderung menimbulkan rasa saling percaya, termasuk juga hubungan loyalitas yang lama terjalin. Apalagi hubungan itu dilatari oleh pendidikan dan pandangan hidup serta wawasan sehingga rasionalitas pemilih memiliki kecenderungan lebih kuat. Hal tersebut dapat disimak pada pandangan salah satu tokoh masyarakat:

³³ Bandingkan dan baca kajian berikut dalam Jedridan M Y. Tiyas Tinov, “Analisis Hubungan Patron-Klien pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011,” *Jurnal Analisis*, t.t., 2, <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3315/Jurnal%20Analisis%20Hubungan%20Patron-Klien%20pd%20Pemilukada.pdf?sequence=1>; Lihat juga kajian David Gilmartin, “The Paradox of Patronage and the People Sovereignty,” dalam *Patronage as Politics in South Asia*, Anastasia Pilianovsky (ed.) (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 125–27.

³⁴ AI, 6 Desember 2017.

“Anif Punto itu memiliki garis keturunan tokoh Muhammadiyah di sini (Kauman). Tapi saya *milih* dia bukan karena itu, melainkan sisi pendidikan, wawasan dan pandangan dunianya yang baik. Dia calon yang muncul bukan dari kalangan birokrasi, politisi, atau yang lainnya, tapi dari wartawan yang paham soal politik juga, Insya Allah *lab*, dia bisa *mimpin* Temanggung dengan baik...”.³⁵

“Pak Anif itu orangnya telaten jika sudah bercengkerama dengan kita-kita ini, *ngobrol* soal ekonomi sampai soal politik, beliau telaten menemani sehingga kita dapat sesuatu dari dia..., sering menyapa dan baik...., persis orang tuanya dan mbahnya dulu..”³⁶

Ada modal sosial yang dimiliki oleh Anif Punto sehingga membuat warga Kauman memilihnya. Adapun modal ekonomi, relatif di atas rata-rata meski tidak sekaya calon bupati lain yang merupakan kalangan politisi murni, birokrat dan pedagang atau pebisnis.

Elite Muhammadiyah Temanggung termasuk aktif di dalam mengawal perkembangan dan pemenangan calon bupati yang diusungnya. Mereka mengadakan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan rutin membahas perihal calon yang akan dimenangkan dalam Pilkada Temanggung. Pematangan taktik-strategis dilakukan dalam rangka memastikan menang. Meski demikian, pembicaraan tentang taktik-strategis itu dilakukan dalam forum-forum khusus, bukan dalam kegiatan-kegiatan lain seperti pengajian. Hal tersebut dinyatakan BM:

“Meskipun kita melakukan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan rutin, tetapi prinsipnya, tidak boleh keluar sampai di jamaah pengajian. Pengajian ya pengajian, politik ya politik, jangan sampai mengakomodir politik di saat menyampaikan pengajian sehingga pengajian murni penyampaian nilai-nilai ajaran Islam. Adapun politik dibicarakan pada saat di luar kegiatan keagamaan. Mesti kita jaga betul sisi etika seperti

³⁵ I, 4 Desember 2017.

³⁶ I, 4 Desember 2017.

ini...”.³⁷

Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa perilaku politik kalangan elite Muhammadiyah akomodatif terhadap hal-hal yang ada di seputar Pilkada Temanggung. Rancangan sejak dari taktik-strategis hingga eksekusi lapangan juga ditentukan dengan baik dan cermat. Perilaku politik akomodatif elite Muhammadiyah dicirikan dengan keterlibatan aktif pada Tim Pemenangan calon dan ikut serta meyakinkan pada masyarakat bahwa calon dari kader Muhammadiyah yang diusung PAN (Anif Punto Utomo) memiliki pandangan dan visi ke depan untuk memajukan Temanggung. Mereka juga terlibat pada pertemuan-pertemuan rutin untuk menyukseskan kampanye calon, mengatur taktik-strategis dan menjaga *marwah politik* dengan baik, menguasai wilayah-wilayah lokal sebagai arena politik serta menjaga agar lembaga Muhammadiyah tidak terkena imbas politik dari perilaku politik yang dilakukan. Sikap elite Muhammadiyah yang akomodatif terhadap proses pemenangan Pilkada dijelaskan oleh TS:

“Partai itu harus punya massa, dalam hal ini yang menarik massa bukan partainya, tapi Muhammadiyah. Karena yang punya massa itu Muhammadiyah. Maka elite Muhammadiyah ikut serta mendesain dan menentukan eksekusi lapangan. Jika suara PAN di DPRD ada tujuh kursi, itu karena ada beberapa kader Muhammadiyah tersebar di beberapa partai seperti PPP, PKS, Golkar dan Nasdem. Makanya kita berani maju ke Pemilukada Temanggung karena punya tujuh kursi sama dengan PDI-P juga tujuh kursi.”³⁸

Perolehan suara tertinggi calon bupati Anif Punto Utomo di Kauman disebabkan oleh faktor rasional pemilih. Masyarakat Kauman tidak semuanya warga Muhammadiyah. Wilayah Kauman Selatan sekitar masjid Agung Temanggung mayoritas warganya non-Muhammadiyah, sementara di Kauman Utara wilayah Suronatan tempat tinggal keluarga Anif Punto Utomo jumlah warga Muhammadiyah signifikan. Layaknya masyarakat perkotaan, visi dan pandangan dunia masyarakat Kauman tidak lagi dipengaruhi oleh latar

³⁷ BM, 10 November 2017.

³⁸ TS, 2 Desember 2017.

belakang organisasi sosial keagamaan, kepartaian, atau solidaritas etnisitas lainnya, tetapi oleh kebutuhan bahwa mereka menginginkan sebuah tatanan politik yang maju, humanis, religius dan bermartabat. Menurut TS:

“... saya memilih pak Anif Punto itu karena dia memiliki visi yang menurut saya baik. Insya Allah janji politik akan dipenuhinya. Dia bukan dari politisi atau birokrat tetapi dari profesional yakni wartawan, insya Allah jiwa pendidik/akademisi, jujur dan warga Muhammadiyahnya baik. Karena warga Kauman, jadi saya punya harapan agar Temanggung ke depan maju...”.³⁹

Keterlibatan secara akomodatif baik dari elite Muhammadiyah maupun PAN menunjukkan ada keterlibatan aktif di dalam pemenangan calon bupati yang diusungnya. Hasil keterlibatan aktif itu membawa perolehan suara tertinggi di TPS 4 dan TPS 6. Selain perilaku partisipatif dan perilaku akomodatif, mereka juga memiliki tindakan politik partisipatoris, yakni perilaku politik yang memberi kesempatan berpartisipasi dan saling memberi “keuntungan” baik itu bagi elite maupun konstituen masyarakatnya. Dengan demikian, maka perilaku politik elite Muhammadiyah Temanggung adalah perilaku politik partisipatif, akomodatif dan partisipatoris.

Penting digarisbawahi bahwa potret keberhasilan itu dapat dilihat dari: *pertama*, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS 4 yakni 38,7% suara, dan TPS 6 yakni 81,3% suara, sebagaimana telah ditampilkan pada Tabel 2; *kedua*, hasil dari perilaku akomodatif, perilaku partisipatif dan perilaku partisipatoris mampu membawa perolehan calon Bupati Anif Punto memperoleh suara tertinggi khususnya di Wilayah tersebut.

Pilihan Rasional dalam Perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*

Beberapa kalangan banyak yang menempatkan wilayah politik sebagai wilayah sains dan humaniora yang terpisah dari wilayah agama. Namun tak bisa dielakkan bahwa perilaku politik yang dilakukan oleh masyarakat maupun para politisi adalah cerminan dari

³⁹ TS, 4 Desember 2017.

nilai-nilai agama yang dianutnya. Menilik tentang kerangka pikir modern antara sains dan agama (dalam hal ini hubungan perilaku politik dengan nilai-nilai keagamaan), meskipun keduanya berpretensi bicara tentang realitas, namun masih sering terjadi ketidaksesuaian dalam penerapannya. Para ilmuwan penganut kebenaran sains mengidentifikasi yang riil melalui data yang dapat diukur (*meassurable*), dapat diverifikasi (*verifiable*) dan dapat dihitung secara matematis (*accountable*). Mereka juga berasumsi bahwa metode sains merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya dan dipahami. Pada akhirnya, penganut paham ini cenderung memaksakan otoritas sains (politik) ke bidang-bidang di luar sains (agama).⁴⁰ Sedangkan agama, bagi kalangan saintis dianggap subjektif, tertutup dan sangat sulit berubah. Keyakinan terhadap agama juga tidak dapat diterima karena bukanlah data publik yang dapat diuji dengan percobaan dan kriteria sebagaimana halnya sains. Agama tidak lebih dari cerita-cerita mitologi dan legenda sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan sains.⁴¹ Hal ini bisa dibahasakan ulang bahwa politik tidak bisa diintegrasikan dengan agama. Bagaimana dengan fikih siyasah sebagai penjabaran ilmu politik yang tentu saja berbasis Islam?

Untuk kasus Indonesia, ada kesamaan corak yang diwakili oleh para pemimpin dan aktivis Islam pada tahun 1950-an dan 1960-an, dan corak pemikiran generasi baru dan aktivis Islam. Para pendukung dari kedua corak pemikiran tersebut memiliki landasan teologis yang sama yaitu keyakinan akan watak holistik Islam, sebagaimana yang ditunjukkan dalam berbagai sumber utama Islam (antara lain QS. al-Nahl [16]: 89).⁴²

Keberadaan fikih siyasah merupakan upaya dalam penjaminan hak-hak setiap manusia, baik hak individu maupun kelompok lewat hak politik. Setiap manusia yang akan mewujudkan tujuan untuk

⁴⁰ Armahedi Mahzar, *Revolusi Integralisme Islam* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 212.

⁴¹ Mahzar, hlm. 214.

⁴² Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 176–79; Lihat juga Shobahussurur, “Relasi Islam dan Kekuasaan dalam Perspektif Hamka,” *Jurnal Asy-Syirah* 43, no. 1 (2009), <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/98>.

kepentingan pribadi dan bersama, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah lewat partisipasi politik. Politik adalah ikhtiar untuk mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik.⁴³ Peter Merk, sebagaimana dikutip Maemunah, menyatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.⁴⁴ Ibn Taimiyah, dalam *Majmu' Fatawa* mengatakan: "Tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan sempurna, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali jika ia tergabung dalam sebuah perkumpulan (*ijtima'i*), mewujudkan kerja sama dan tolong-menolong. Kerja sama dan tolong-menolong itu dimaksudkan untuk menggapai manfaat dan mencegah yang membahayakan, melewati cara dan langkah yang benar tidak menzolimi pihak lain."⁴⁵

Seiring dengan perkembangan politik dewasa ini, muncul pendapat yang mengatakan bahwa politik dalam Islam tidak diatur secara spesifik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. Nash-nash yang berhubungan dengan politik Islam hanya bersifat umum sehingga diperlukan interpretasi lebih lanjut untuk penegakan perpolitikan saat ini. Dalam kondisi ini, peranan *maqashid asy-syari'ah* sangat menentukan. *Maqashid asy-Syari'ah* merupakan tujuan ditetapkannya suatu hukum syar'i. Jasser Auda, menyempurnakan teori *maqashid* (dalam hal ini dikategorikan dalam ranah agama), dengan pendekatan multidisipliner (sains), yang bertujuan untuk merespons permasalahan-permasalahan kontemporer di dunia global saat ini. Langkah Jasser Auda ini bukan sekadar untuk menciptakan teori baru, melainkan bagaimana teori tersebut bisa terimplementasi pada masyarakat muslim sekaligus memperbaiki kondisi umat Islam dewasa ini. Pertanyaan yang penting diajukan adalah, mengapa sampai sekarang masih banyak ditemui kaum muslim yang miskin, bodoh, gampang disuap, tertindas, tidak bermoral, kurang toleran dan sebagainya?

Untuk menganalisis fenomena tersebut, setidaknya dibutuhkan dua pendekatan yang bisa membidik dan menganalisis sekaligus

⁴³ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 15.

⁴⁴ Maemunah, "Politik Islam dalam Maqashid Syariah," *El-Maslahah* 8, no. 1 (2018): hlm. 16.

⁴⁵ Maemunah, hlm. 16.

memberikan kontribusi praktis maupun kontribusi pemikiran. *Pertama*, pendekatan yang berhubungan dengan dimensi waktu dan kesejarahan, dan *kedua*, pendekatan yang berhubungan erat dengan konsep filsafat.⁴⁶ Dalam pemaparan *maqashid asy-syari'ah*-nya, Jasser Auda mengemukakan tiga langkah konkret. *Pertama*, melalui penjagaan terhadap ada enam hal, yakni: menjaga iman (*preserving of faith*), menjaga jiwa (*soul*), menjaga akal (*mind*), menjaga keturunan (*offspring*), menjaga kehormatan (*honor*), dan menjaga harta (*wealth*).⁴⁷ *Kedua*, melalui pendekatan multidisiplin yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan lain. Dalam hal ini, Jasser Auda memposisikan hukum Islam dengan sangat sistematis yang relevan dengan berbagai bidang, baik ilmu agama maupun ilmu sains humaniora. *Ketiga*, teori sistem, yang merupakan pendekatan baru yang independen, yang mencakup sejumlah sub-disiplin, antara teori sistem dan analisis sistemik. Termasuk di dalamnya adalah konsep tentang kognisi (*cognition*), kesatuan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan antarnilai (*interrelatedness*), multidimensional, dan mengarah kepada tujuan tertentu (*purposefull*).⁴⁸

Konsep Jaseer Auda bila ditarik dalam konsep perpolitikan semakna dengan sistem demokrasi yang mengarah pada konsep masyarakat madani. Seperti dikutip oleh Subaidi dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* bahwa model demokratisasi yang baik terbentuk melalui beberapa tahap: tahap pertama, perumusan dan pengembangan identitas nasional; tahap kedua, diikuti oleh pengembangan pranata politik yang efektif; dan tahap ketiga, pengembangan partisipasi politik.⁴⁹

Perbincangan tentang partisipasi politik masyarakat Indonesia,

⁴⁶ M. Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi,” *Jurnal Asy-Syir'ah* 4, no. 2 (2012): hlm. 331.

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Sharia as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London–Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3.

⁴⁸ Auda, xxvi.

⁴⁹ Subaidi Qomar, “Politik Islam, Demokrasi, Kepakaan Gender, dan Feminisme” 42, no. 1 (2008), <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/255/195>.

masih belum ditemukan cakupan kesadaran berpolitik yang merata. Beberapa kalangan masyarakat menentukan suara politik berdasarkan tokoh panutannya, partai pengusungnya, atau kesepakatan komunitasnya. Beberapa kalangan lain memilih berdasar pertimbangan rasional dengan prediksi politiknya. Beberapa yang lain lagi menentukan pilihan melalui jalur pragmatis dengan menerima imbalan politik yang dirasa menguntungkan dirinya. Dari semua cara yang dilakukan, pilihan masyarakat akan mengarah kepada kehidupan yang aman damai penuh dengan kemaslahatan.

Keberadaan partai dalam dinamika politik merupakan perwujudan *bifz al-ummah* atau pemeliharaan keberlangsungan tatanan masyarakat dalam bingkai politik. Perilaku politik masyarakat Temanggung yang menentukan pilihannya berdasarkan rasionalitas kemampuan calon terpilih, bisa dikatakan menghilangkan sekat *patron client* yang sangat umum terjadi di berbagai daerah. Anif Punto yang diusung oleh Partai PAN sebagai satu-satunya partai nonkoalisi, berhasil memenangkan suara di tengah-tengah masyarakat yang bukan mayoritas berafiliasi Muhammadiyah. Janji kampanye dan pendekatan politik yang digunakan bisa meyakinkan masyarakat. Kemenangan Anif di wilayah tersebut mengindikasikan pergeseran cara pandang masyarakat yang tidak lagi terbelenggu ke arah fanatik golongan. Masyarakat cenderung tertarik dengan substansi dalam janji politik dan visi misinya dibanding keikutsertaan dengan kelompok yang berpengaruh di wilayah tersebut.

Perilaku politik elite dan pilihan warga Muhammadiyah dalam Pilkada Temanggung jika dilihat dari konsep *maqashid asy-syari'ah* Jaseer Auda, maka bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, partisipasi masyarakat dalam berpolitik merupakan kesadaran yang tumbuh berdasarkan *bifz an-nafs* (perlindungan jiwa). Dengan turut memberikan aspirasi politik, dia sudah menyampaikan hak politiknya, dan tentunya berhak mendapatkan suaka politik. Pilihan politiknya ditujukan untuk calon yang diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan kesejahteraan sebagai bentuk perlindungan diri dan perlindungan masa depannya (*bifz an-nasl*). Di samping itu, tujuan lainnya adalah keinginan untuk melindungi kesejahteraan keluarga dan masa depan pendidikan anak-anaknya yang merupakan perwujudan dari *bifz an-nasl* dan *bifz al-'aql*. Kesadaran tersebut merupakan bentuk keinginan untuk memperoleh

perlindungan akal (*bifz al-'aql* - *preserving of mind*). Konsep *bifz al-'aql* Jasser Auda tidak terpaku pada pemeliharaan akal, tetapi juga bagaimana merawat akal pikiran dengan aktivitas menuntut ilmu sepanjang zaman, mengurangi pengangguran dengan membekali ilmu dan ketrampilan serta membuka lapangan pekerjaan. Pemahaman tentang konsep ini berimbang pada terciptanya ketersediaan lapangan kerja yang mengarah pada perlindungan harta (*bifz al-mal* - *wealth*). Dengan pendidikan yang layak maka masyarakat akan mampu meningkatkan taraf hidup melalui potensi yang dimiliki. Pendidikan tinggi juga bisa mengubah cara berpikir dari satu sudut pandang ke arah berpikir yang majemuk dan lebih terbuka. Kemampuan untuk mengendalikan emosi dan bertahan dalam hidup (*bifz al-nafs* - *preserving of soul*) menjadi lebih stabil ketika seseorang sudah mendapatkan pendidikan yang memadai.

Kedua, masyarakat Kauman Temanggung, dalam menentukan pilihan politiknya, tidak hanya melihat pada sisi politiknya, dalam hal ini partai pengusung. Pilihan masyarakat terhadap sosok Anif Punto lebih didasarkan pada aspek rasionalitas. Bisa dilihat dari pribadi calon sebagai putra daerah yang taat menjalankan ajaran Islam, atau dari visi misi yang lebih menjanjikan dibanding calon lain. Cara masyarakat menerjemahkan visi misi yang diusungnya, sudah mengintegrasikan beberapa pola pikir yang menurut Jasser Auda sebagai penerapan filsafat atau logika berpikir. Mereka sudah berpikir bahwa politik tidak hanya berhubungan dengan partai pengusung, atau “saya dapat apa dari kemenangannya”, tetapi berdasar janji politik yang mengarah pada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Faktor pendidikan diidentikkan dengan cara berpikir masyarakat modern. Masyarakat juga melihat dari sisi keberagamaan calon sebagai pemeluk Islam yang taat. Di sinilah alur berpikir masyarakat Kauman mampu menghubungkan ranah politik, ranah agama dan ranah pendidikan. Melalui aspirasi politik, kehidupan beragama dan peningkatan pendidikan diharapkan bisa tercapai dengan baik.

Ketiga, cara berpikir rasional masyarakat Kauman Temanggung tersebut, bila dilihat dari klasifikasi Jaseer Auda dalam menghubungkan dengan teori sistem, mengarah kepada tujuan tertentu (*purposefull*), yang dalam hal ini adalah memperoleh peningkatan di bidang pendidikan. Dalam proses mencapai tujuan tersebut dibutuhkan keterbukaan (*openness*) antarberbagai elemen masyarakat. Keterbukaan ini bisa dicirikan dengan proses pemilihan

yang tanpa tekanan dari kelompok tertentu; juga dilihat dari proses Pilkada yang *fair* dengan harapan melahirkan suatu tatanan masyarakat yang sehat secara politik. Cara berpikir, bersikap dan bertindak ini menunjukkan bahwa masyarakat Kauman berani menentukan pilihan sendiri, tidak sekedar *taken for granted* mengikuti apa yang sudah digariskan oleh partainya.

Terlepas dari terwujud atau tidaknya janji tersebut, perilaku masyarakat Kauman Temanggung dalam menyalurkan aspirasi politiknya sudah mengarah kepada tujuan yang diharapkan (*purposefull*) dengan proses pencapaian yang dilakukan secara *fair* dan terbuka (*openness*). Mereka lebih melihat, bagaimana latar belakang calon, apa visi misi dan target yang akan dicapai, dan harapan seperti apa yang diberikan untuk masyarakat Temanggung untuk masa yang akan datang.

Penutup

Perilaku politik elite Muhammadiyah Temanggung pada Pilkada Tahun 2013 adalah moderat-akomodatif yang diterjemahkan secara beragam oleh kalangan elite dan warga biasa. Perilaku politik akomodatif yang dilakukan oleh elite Muhammadiyah dilakukan dengan terlibat aktif pada Tim Pemenangan calon dan ikut serta meyakinkan pada masyarakat pada calon yang berasal dari kader Muhammadiyah. Perilaku politik partisipatif ditunjukkan oleh segenap anggota biasa Muhammadiyah, dengan melakukan aksi politis secara rasional yang ditujukan guna mempengaruhi keputusan politik, yakni keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kelompok maupun individu. Perilaku politik partisipatoris, yakni perilaku politik yang memberikan kesempatan berpartisipasi dan keterlibatannya dalam perhelatan politik, oleh karena elite memiliki modal sosial, modal pendidikan, modal ekonomi, modal politik, dan modal budaya, yang mampu membangkitkan kepercayaan dan nilai-nilai yang berakar mendalam pada masyarakat sebagai sebuah proses sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, secara umum, dapat dikatakan bahwa berdasarkan teori *maqashid asy-syari'ah*, kesadaran warga dalam menentukan pilihannya tidak terbelenggu oleh sekat ideologi, partai atau organisasi masyarakat yang dinaungi. Pilihan ditujukan kepada calon yang menurutnya bisa memberikan perlindungan yang lebih

baik, baik menyangkut perlindungan terhadap jiwa (*bifz al-nafs*), perlindungan terhadap harta (*bifz al-mal*) maupun perlindungan terhadap akal (*bifz al-'aql*), yang juga berkorelasi dengan aspek perlindungan lain dalam *adab-dharuriyah al-khamsah*.

Daftar Pustaka

A, 2 Desember 2017.

Abdullah, M. Amin. “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi.” *Jurnal Asy-Syir'ah* 4, no. 2 (2012).

AI, 2 Desember 2017.

_____, 6 Desember 2017.

Alfian. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Andrain, Charles F. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Alih bahasa oleh Luqman Hakim. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Sharia as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London–Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

“Bambang Irawan Menang Pilkada Temanggung.” Diakses tanggal 4 Maret 2014. <http://krjogja.com/read/174911/bambang-irawan-menang-pilkada-temanggung.kr>.

BM, 10 November 2017.

_____, 2 Desember 2017.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. XI. Jakarta: Gramedia, 2000.

Coleman, James S., dan Thomas J. Fararo. *Rational Choice Theory: Advocacy and Critique*. Newbury Park, Calif: SAGE Publications, 1992.

“Data KPUD Kabupaten Temanggung Tahun 2013,” 2013.

- Dermawan, Andy. "Dialektika Muhammadiyah dan Politik: Suatu Ikhtiar Memahami Pasang Surut dan Dinamika." Makalah dipresentasikan pada Diskusi Bulanan Institut Riset Sosial dan Humaniora, Yogyakarta, 8 September 2015.
- "Disertasi Teliti Perilaku Politik Elite Muhammadiyah." Diakses tanggal 5 September 2016. <http://www.malang-post.com/pendidikan/73247-disertasi-teliti-perilaku-politik-elite-muhammadiyah>.
- Efendi, David. *Politik Elite Muhammadiyah: Studi Tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah*. Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2014.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Gilmartin, David. "The Paradox of Patronage and the People Sovereignty." Dalam *Patronage as Politics in South Asia*, Anastasia Pilianovsky (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Hamdi, Ridho al-. "Dinamika Islam dan Politik Elite Muhammadiyah Tahun 1998-2010." *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 1 (Februari 2012).
- Haryanto. *Elite, Massa dan Konflik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, 1990.
- Hidayat, Syamsul. "Pemikiran Muhammadiyah tentang Pluralitas Budaya." Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- I, 4 Desember 2017.
- Jary, Julia, dan David Jary. *Collins Dictionary of Sociology*. Glasgow: Harper Collin Publisher, 1991.
- Jurdi, Syarifuddin. "Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia: Tahun 1966-2006." Disertasi, Program Studi Politik Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana UGM, 2008.
- Leege, David C., dan Lyman A. Kellstedt. *Agama Dalam Politik Amerika*. Alih bahasa oleh Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi. Jakarta: Yayasan Obor, 2006.
- Maemunah. "Politik Islam dalam Maqashid Syariah." *El-Maslahah* 8, no. 1 (2018).

- Mahzar, Armahedi. *Revolusi Integralisme Islam*. Bandung: Mizan, 2004.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- Mukhlis. "Perilaku Politik Elite Keagamaan dalam Politik Lokal." *Jurnal Salam* 18, no. 1 (Juni 2015).
- Nashir, Haedar. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2006.
- . *Perilaku Elite Politik Muhammadiyah di Pekajangan*. Yogyakarta: Tarawang, 2000.
- Nurmandi, Ahmad. "Perilaku Birokrasi Publik di Indonesia: Sebuah Kajian Teoritis." *Jurnal Sosiohumaniora* 7, no. 1 (Juli 2005).
- Qomar, Subaidi. "Politik Islam, Demokrasi, Kepekaan Gender, dan Feminisme" 42, no. 1 (2008). <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/255/195>.
- Rachman, Budhy Munawar. *Argumen Islam untuk Sekularisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: CV. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Shobahussurur. "Relasi Islam dan Kekuasaan dalam Perspektif Hamka." *Jurnal Asy-Syirah* 43, no. 1 (2009). <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/98>.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Suwarno. *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Temanggung, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. "Visi, Misi, dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013." KPU Kabupaten Temanggung, 2013.
- Tinov, Jedridan M Y. Tiyas. "Analisis Hubungan Patron-Klien pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011." *Jurnal Analisis*, t.t. <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3315/Jurnal%20Analisis%20Hubungan%20Patron-Klien%20pd%20Pemilukada.pdf?sequence=1>.

TS, 2 Desember 2017.

_____, 4 Desember 2017.

Warsito, Tulus. *Rasionalitas Politik*. Yogyakarta: Program Doktor S3 Politik Islam UMY bekerjasama dengan Komojoyo Press, 2017.